

ABSTRAK

Syahid Abdulrahman Koto. 1210832002. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi; “Konflik Kepentingan Kelompok Masyarakat dan Lembaga Negara (Studi Kasus: Konflik dalam penertiban Tambang Emas Di Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2012)”.

Kajian skripsi ini fokus pada permasalahan konflik kelompok penambang dengan polisi sebagai lembaga negara. Dalam konflik ini terdapat hubungan yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik berakhir dengan adanya aksi *sweeping* yang dilakukan oleh kepolisian. Sehingga menyebabkan traumatik mendalam bagi masyarakat Aur Jaya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis konflik dan penyebab terjadinya konflik antara kelompok masyarakat dan polisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara *Open-Ended*, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposif sampling*. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan penjadohan pola, pembuatan penjelasan, dan deret waktu tanpa melupakan analisa etik dan emik. Kemudian data penelitian ini dianalisis menggunakan konsep dan teori konflik menurut Simon Fisher dan Wirawan. Penelitian ini juga menggunakan konsep pertambangan rakyat dan konsep kekuasaan dalam proses konflik. Hasil penelitian sebagai berikut: **Pertama**, konflik berawal dari adanya upaya penertiban dari pihak kepolisian, upaya penertiban tersebut memicu perlawanan dan menyebabkan kekerasan diantara dua belah pihak yang terlibat bahkan diiringi dengan penyanderaan kapolres Dharmasraya, kemudian terjadi aksi *sweeping* yang dilakukan oleh polisi. Konflik ini mengakibatkan traumatik yang mendalam terhadap warga Aur Jaya. **Kedua**, Penyebab konflik terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat (kebutuhan ekonomi) dan aparat kepolisian (penegakan hukum) sehingga terjadinya kontak fisik. **Ketiga**, regulasi dari pemerintah daerah yang tidak jelas terhadap penambangan rakyat membuat bingung masyarakat sehingga izin pertambangan tidak dimiliki oleh masyarakat.

Kata kunci: Konflik, kelompok masyarakat, lembaga negara

ABSTRACT

Syahid Abdulrahman Koto. 1210832002. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Andalas, Thesis Title: "Conflicts of Interest Society and State Institutions (Case Study: Conflict in Curbing Gold Mine In Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang, Dharmasraya In the Year 2012) ".

This research studies focus on the causes of conflict groups of miners with the police as a state institution. In this conflict there is a relationship that has goals that are inconsistent. Conflict ended with a sweeping action carried out by the police. Causing deep traumatic for the people of Aur Jaya. for this study aims to determine the chronology of the conflict and the causes of conflicts between communities and the police. This study used qualitative methods, case study and descriptive. The technique of collecting data using the Open-Ended interview, documentation and observation. election informant study, researchers using purposive sampling technique. Data were analyzed using pattern pairing, manufacture an explanation, and without forgetting the time series analysis of ethics and emic. Then the data were analyzed using the concepts and theories of conflict by Simon Fisher and Wirawan. This study also uses the concept of local mining and the concept of power in the process of conflict. The results of the study as follows: First, the conflict originated from the enforcement efforts of the police, the enforcement efforts sparked resistance and lead to violence between the two parties involved even accompanied by chief of Dharmasraya hostage, then going on a sweeping action by the police. This conflict resulted in traumatic deep against Aur Jaya residents. Second, the cause of the conflict occurred because of differences between the interests of society (economic needs) and the police (law enforcement) so that the occurrence of physical contact. Third, regulation of local governments that are not clear to the mining people confuse the public so that the mining permit is not owned by the public.

Keywords: Conflict, community groups, state agencies